

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jimly Asshiddiqie, Ceramah : “Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945” (Departemen Kehakiman RI, 1999)

Miriam Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Tim Penyusun Buku Hubungan Sipil-Militer Lembaga Ketahanan Nasional Departemen Pertahanan Keamanan Nasional, Hubungan Sipil-Militer:” Peran, Kontribusi dan Tanggung Jawab Sipil-Militer dan penyelenggaraan Negara, (PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1999)

Wignjosoebroto Soetandyo, Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep dasar dan pengertiannya yang klasik pada masa masa awal perkembangannya dalam toleransi dalam keragaman: visi untuk abad 21, kumpulan tulisan tentang Hak Asasi Manusia, (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003)

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Muhammad Abdukadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 2004)

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010)
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Press, 2022)
- Wiratna Sujarweni, Metodeologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014)
- Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah, (Jakarta : Prenada Media, 2011)
- Muladi, Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia, (Jakarta, the Habibie Center, 2002)
- Gerung Rocky, Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus, (Jakarta: Filsafat UI Press, 2006)
- Rahayu, Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015)
- Koesnan R.A. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia,(Bandung: PT Sumur, 2005)
- Jimly Asshiddiqie. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. (Jakarta: PT Gramedia: 2016)
- Ekadjahjana Widodo dan Sudaryanto Totok, Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti 2001),

Oki Waju Budijanto, “Upah layak Bagi Pekerja Buruh dalam Perspektif HAM”,
(Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia”,(Jakarta:PT Gramedia:2017),
Purbadi Hardjoprajitno, dkk, Hukum Ketenagakerjaan. (Banten: Badan Penerbit
Universitas Terbuka, 2014),
Idrus, Affandi, “Pendidikan Anak Berkonflik Hukum, Model Konferensi Antara
Fungsionalis Dan Religious, (Bandung: Alfabeta, 2007
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta:
Liberty, 2007)



B. Jurnal

Sidharta Arief, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", Jurnal Hukum Jentera Edisi 3, November, 2004.

Ilham Wirapratama, "*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*", Jurnal Lex Reinassance, Vol 4, No 1, July, 2019.

Titin Rusmiati, "*Implementasi Sistem Pengupahan pada Perjanjian Kerja di BMT An-Nafi Batanghari Lampung Timur*", Jurnal Metro Lampung, Institut Agama Islam Negeri, 2018,

Basarah Ahmad, "*Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal MMH, 2014.

Mochtar Zainal Arifin dan Satriawan Iwan, "*Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia*", Jurnal Konstitusi, November 2009.

Anzward Bruce dan Hidayat Ratna, "*Legal Protection For Workers on The Types and Nature of Jobs In Realizing Justice*", Journal de jure, Volume 12, 1 April 2020.

Anita Niru, dan Zaluchu Tiberius, "*Perlindungan Hukum Hak-hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*", Journal Universitas Suryadarma. Volume 6, 2017

Barzah Latupono, "*Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja kontrak di Kota Ambon*", Jurnal Sasi Vol. 17, September 2011

- Wahju Oki, “*Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM*”,
Badan Penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM, Volume 17, Nomor
3, September 2017
- Madjid Nurcholis, “*Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan*”,
jurnal Islamika Nomor, Juli 1995.
- Zulfi Imran, “*HAM Internasional dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Universitas
Pembangunan Panca Budi. Vol 7, No 7, Maret 2019.
- Kumala Ratna, “*Perkembangan Pengaturan HAM dalam Hukum di Indonesia*”,
Jurnal metro Yuridis Vol 2 No 1, Maret 2019.
- Joko Ismono, “*Hubungan kerja dalam perspektif ham ekonomi dan pembangunan*”,
Journal Holrev, Volume 2, Issue 1 , Maret 2018.
- Nurlani Meirina, ”*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Tinjauan Perspektif*
Keadilan dan Kesejahteraan Anak jurnal”, Journal kajian pembaharuan
hukum, 22 Maret 2021.
- Nur Alfiyani, “*Perbandingan Regulasi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang*
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja”, dalam Jurnal Hukum
dan Kemasyarakatan Vol,14 No.2, Desember 2020.
- Sigit Riyanto, dkk, “*Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU. No. 11 tahun*
2020 tentang Cipta Kerja”, jurnal Artikel, 2020.
- Siti Solekhah, dkk, “*Omnibus Law Cipta Kerja dan Perspektif Ekonomi Islam*
tentang Tenaga Kerja”,Jurnal Ats-Tsarwal, Vol, 1 No. 1, Maret 2021

Mohammad Ilyas, “*Pengambilalihan Dan Penutupan Perusahaan Yang Berdampak Pada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1, 2018.

Ine Nita, “*Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Dinas Tenaga Kerja pada Perusahaan Swasta di Kota Banjar*”, Jurnal Unigal, Volume 4 Nomor 3, 2017.

Indra Rahmatullah, “*HAM Pekerja Anak dalam Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia*”, Jurnal UIN Jakarta, Volume 4, Nomor 1, 2020.

Netty Endrawati, “*Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahan*”, Jurnal Ilmiah Hukum, Hukum Refeksi Hukum, FH UKSW, Salatiga 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Internasional
Covenant of Civil and Political Rights

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi *Convention on the
Rights of the Child*

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemberian Sanksi Administratif

Convention No 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment

D. Sumber Internet

Biro Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indonesia Hadapi Tantangan di Sektor Pertanian, Lebih dari 800 Ribu

Anaka Terjebak dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.
<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3248/indonesia-hadapi-tantangan-pekerja-anak-di-sektor-pertanian-lebih-dari-800-ribu-anak-terjebak-dalam-bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak>

Monica Ayu, Kasus-kasus Pekerja Anak di Indonesia.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia>

Radika, Aturan Menyusun Struktur dan Skala Upah Terkini.

<https://www.gadjian.com/blog/2021/04/01/aturan-menyusun-struktur-dan-skala-upah-terkini-uucipta-kerja/>

Nabilya Risfa S.H., M.H., Betapa Peliknya Penetapan Upah Pada era UU Cipta

Kerja. <https://theconversation.com/betapa-peliknya-penetapan-upah-minimum-pada-era-uu-cipta-kerja-174470>

Yudha Mangala, Kementerian Ketenagakerjaan Luncurkan Program ‘Zona Bebas

Pekerja Anak” <https://news.republika.co.id/berita/nry281284/menaker-luncurkan-program-zona-bebas-pekerja-anak>

Humas Sekretariat Kabinet, Inilah Langkah Konkret Pemerintah Hapuskan Pekerja

Anak. <https://setkab.go.id/inilah-langkah-konkret-pemerintah-hapuskan-pekerja-anak/>